

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBELAJARAN  
PROGRAM PAKET C SELAMA MASA PANDEMI COVID-19  
(STUDI DI PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
HARAPAN BANGSA 1 KOTA BANDAR LAMPUNG)**

Eko Purnomo dan Muhammad Oktaviannur

**ABSTRACT**

*The problems in this study are: (1) how is the implementation of the package c program learning policy during the covid-19 pandemic period at pkmb harapan bangsa 1 bandar lampung city? (2) what are the aspects that hinder and support the implementation of the package c program learning policy during the covid-19 pandemic period at pkmb harapan bangsa 1 bandar lampung city*

*The research method which according to the researcher is in accordance with this research method is to use a qualitative type of research with a descriptive analysis method. the use of this method is to describe and study qualitatively, how the implementation of the package c program learning policy during the covid-19 pandemic period at the hope community learning activity center nation 1 city of bandar lampung. all data were obtained directly from informants in the field using interviews and observations.*

*The results showed that the implementation of the package c program learning policy during the covid-19 pandemic at the harapan bangsa 1 community learning activity center, bandar lampung city, had been running. this is in accordance with the results of the study showing that the policy has been running, but it has not been optimal, this occurs due to a lack of socialization, so that information about the implementation of the package c learning policy during this pandemic is ineffective, and the lack of supporting infrastructure facilities for learning with online methods are very effective. minimal budget so that teaching and learning activities at the community learning activity center (pkmb) have not been maximized.*

*The implementation of the learning policy of the package c program shows that online learning has not run optimally because of several obstacles such as the economic level is relatively weak, signal constraints, quota costs so that the implementation of the package c learning program at the harapan bangsa community learning activity center in bandar lampung city which has not been fully implemented. as planned due to limited human resources who master information technology (it), as well as the lack of learning support facilities and still in dire need of attention and assistance from the government.*

*Keywords: Policy Learning ; Program Package C ; Pandemic*

## **A. PENDAHULUAN.**

Pendidikan memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa. Demikian pentingnya pendidikan ini sehingga UUD 1945 telah mengamanatkan untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % APBN dan APBD untuk biaya pendidikan namun dalam realitanya belum terealisasi hingga saat ini. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh negara, Peraturan Pemerintah nomor : 47 tahun 2008 tentang program wajib belajar 12 tahun bagi seluruh warga negara

Indonesia dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 36 tahun 2009 tentang penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan paket C.

Bertambahnya jumlah anak putus sekolah, meningkatnya angka pengangguran, minimnya lapangan pekerjaan, kurangnya relevansi pendidikan sekolah dengan kehidupan nyata, rendahnya kemampuan bersaing bangsa kita diluar negeri. Selanjutnya, Suryadi (2006:v) mengatakan keragaman latar belakang peserta program kesetaraan termasuk paket C, dari kalangan masyarakat secara ekonomi kurang mampu, anak-anak dari etnis minoritas, anak-anak di daerah terpencil, anak-anak jalanan dan peserta didik dewasa dengan daya serap yang amat beragam dan relatif lambat turut berpengaruh pada pencapaian tujuan formal program tersebut. Data peserta didik Program Paket C pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Harapan Bangsa 1 Kota Bandar Lampung sebelum dan selama Pandemi *Covid* -19 dapat dilihat pada tabel 1.2. :

Tabel 1.2. : Data Peserta Didik Paket C di PKBM Harapan Bangsa 1.

TAHUN	JUMLAH SISWA	Keterangan
2019	193	Sebelum Covid-19
2020	121	Selama Covid-19
2021	89	Selama Covid-19

Sumber : PKBM Harapan Bangsa tahun 2021

Sejak pemerintah mencanangkan wajib belajar 12 tahun, program Luar Sekolah (PLS), paket C dan kejuruan mendapat respon yang positif dari masyarakat. Penyelenggaraan program tersebut memberi guliran dampak yang positif bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang sangat cepat. Saat ini tuntutan masyarakat terhadap Pendidikan Luar Sekolah untuk menyelenggarakan program pendidikan lanjutan dari paket C begitu besar.

Pendidikan program paket C, akhir-akhir ini memperoleh tanggapan positif dari masyarakat seperti yang dapat kita lihat dan baca di berbagai pemberitaan media masa. Kesadaran masyarakat akan perlunya memiliki suatu kompetensi tertentu dalam menghadapi persaingan untuk mendapatkan peluang berusaha atau bekerja yang semakin hari terasa kurang kondusif turut memacu semangat masyarakat untuk berupaya membekali diri dengan berbagai keterampilan dan ilmu pengetahuan.

Pelaksanaan program paket C yang diselenggarakan oleh Pusat Kegiatan Belajar

Masyarakat Harapan Bangsa 1 Kota Bandar Lampung, mengalami beberapa kendala yaitu:

1. Kurangnya sosialisasi oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dalam melaksanakan kebijakan pembelajaran dimasa pandemi Covid-19, khususnya paket C.
2. Minimnya fasilitas yang dimiliki oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagai salah satu sarana pendukung pembelajaran.
3. Pelaksanaan dan pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat belum berjalan secara optimal karena terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang hal tersebut dengan Judul Implementasi Kebijakan Pembelajaran Program Paket C Selama Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Harapan Bangsa 1 Kota Bandar Lampung).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pembelajaran Program Paket C Selama Masa Pandemi Covid-19 di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Harapan Bangsa 1 Kota Bandar Lampung?
2. Aspek-aspek apa yang menghambat dan mendukung Implementasi Kebijakan Pembelajaran Program Paket C Selama Masa Pandemi Covid-19 di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Harapan Bangsa 1 Kota Bandar Lampung.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA.**

Konsep Implementasi kebijakan bila dikaitkan dengan kebijakan, maka implementasi dapat dipandang sebagai pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai dicapainya hasil kebijakan. Pada suatu proses atau siklus kebijakan, implementasi pada dasarnya merupakan aktivitas praktis yang dibedakan dari formulasi kebijakan yang bersifat teoritis.

Pelaksanaan kebijakan merupakan satu konsekuensi dari pada adanya tuntutan akan kebijakan dan tuntutan ini bukan sekedar tuntutan akan eksistensi atau terbentuknya kebijakan, melainkan sampai dilaksanakan kebijakan itu. Pelaksanaan kebijakan ini menuntut adanya tata cara dan keserasian agar pelaksanaan dapat berjalan dengan berdaya guna dan berhasil guna dengan optimal tidak efesiennya kebijakan terletak pada pelaksanaan kebijakan dalam hal ini termasuk kekurangan dan kelemahan para aktor pelaksanaan kebijakan, keadaan lingkungan dan sebagainya.

Implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi manakala suatu kebijaksanaan

tertentu yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana namun mengingat kondisi internal ternyata tidak menguntungkan, kebijaksanaan tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang telah ditentukan dengan demikian suatu kebijaksanaan boleh jadi tidak dapat diimplementasikan secara efektif sehingga dinilai oleh para pembuat kebijaksanaan sebagai pelaksanaan yang jelek. Pelaksanaan kebijakan merupakan satu konsekuensi dari pada adanya tuntutan akan kebijakan dan tuntutan ini bukan sekedar tuntutan akan eksistensi atau terbentuknya kebijakan, melainkan sampai dilaksanakan kebijakan itu. Pelaksanaan kebijakan ini menuntut adanya tata cara dan keserasian agar pelaksanaan dapat berjalan dengan berdaya guna dan berhasil guna dengan optimal tidak efesienya kebijakan terletak pada pelaksanaan kebijakan dalam hal ini termasuk kekurangan dan kelemahan para aktor pelaksanaan kebijakan, keadaan lingkungan dan sebagainya.

Konsep Implementasi Kebijakan Pembelajaran Program Paket C Selama Masa Pandemi Covid-19 di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Harapan Bangsa 1 Kota Bandar Lampung, yang dijadikan rujukan sesuai pendapat yang dikemukakan oleh Edwards III, (2000) yaitu: (1) Komunikasi, (2) Disposisi atau Sikap Pelaksana, (3) Kualitas Sumber Daya Manusia, dan (4) Struktur Birokrasi.

### **C. METODOLOGI.**

Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan penelitian ini maka menurut peneliti yang sesuai dengan metode penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penggunaan metode ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pembelajaran Program Paket C Selama Masa Pandemi Covid-19 di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Harapan Bangsa 1 Kota Bandar Lampung, mengkaji secara kualitatif, bagaimana seluruh data diperoleh langsung dari informan lapangan dengan menggunakan wawancara dan Studi dokumen.

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan- penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan.

### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN.**

Implementasi Kebijakan Pembelajaran Paket C Selama Masa Pandemi Covid-19 di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Harapan Bangsa 1 Kota Bandar Lampung, seperti yang dikemukakan oleh Edwards III, (2000) yaitu: (1) Komunikasi, (2) Disposisi atau Sikap

pelaksana, (3) Kualitas Sumber Daya Manusia, dan (4) Struktur Birokrasi.

### **1. Komunikasi**

Kebijakan publik dalam bentuk yang sudah konkrit dan jelas bukan hanya berisi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah melainkan secara rinci telah menyebut pula alokasi dana, personil dan sumber daya lainnya yang diperlukan, selain dari pada itu isinya memuat pula prosedur kerja yang harus ditempuh dalam menggerakkan sumber daya untuk mencapai tujuan kebijakan.

Implementasi kebijakan pemerintahan yang dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Nasional telah mencanangkan tentang pendidikan kesetaraan program Paket C, dirasakan cukup baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang tidak mampu dan putus sekolah, sehingga mereka juga dapat mendapatkan pendidikan dan mengikuti pendidikan sesuai dengan tingkat kesetaraannya. Dengan demikian isi kebijakan yang jelas dan rinci akan memudahkan pelaksanaan dalam melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan. Isi kebijakan yang rinci dapat digunakan pula sebagai indikator dari efektivitas pencapaian tujuan, yang sudah berjalan dan telah disosialisasikan kepada masyarakat.

Implementasi kebijakan pemerintahan yang dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan panduan pembelajaran pada masa pandemi Covid-19 bagi satuan pendidikan formal dan non formal, yang didalamnya pendidikan kesetaraan program Paket C, dirasakan sangat tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga dengan kebijakan pembelajaran dari rumah dapat mencegah penyebaran pandemi yang lebih luas dan mereka tetap mendapatkan pembelajaran dengan sistem daring atau pola pembelajaran dirubah menjadi 1 x dalam seminggu dengan protokol kesehatan yang ketat dan durasi waktu dipersingkat dalam pembelajaran tatap muka (terbatas).

Program paket C yang ada belum sepenuhnya disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat masih ada yang belum mengetahui tentang kebijakan pembelajaran Paket C, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Harapan Bangsa 1 Kota Bandar Lampung. Prinsip ini setara dengan prinsip manajemen, yakni optimalisasi risorsis atau sumberdaya, dan hal tersebut belum bisa terwujud karena keterbatasan fasilitas untuk meningkatkan kompetensi peserta didiknya.

### **2. Disposisi/Sikap Pelaksana.**

Disposisi/Sikap pelaksana merupakan salah satu fungsi yang sangat mendukung berhasilnya suatu kebijakan, sikap pelaksana kebijakan dapat mempengaruhi sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang perilaku atau keadaannya ingin dipengaruhi oleh kebijakan. Mereka diharapkan dapat menyesuaikan diri terhadap pola-pola interaksi

baru yang dihasilkan oleh kebijakan. Implementasi tentang kebijakan program paket C, sangat membantu masyarakat putus sekolah, namun karena peleksanaannya belum optimal karena para pelaksana program paket C belum sepenuhnya melaksanakan dengan baik, karena keterbatasan berbagai fasilitas yang ada.

Dari hasil penelitian bahwa dengan indikator-indikator pembentuk dimensi disposisi/sikap pelaksana kebijakan paket C cukup sederhana, namun demikian karena sarana yang tersedia khususnya dalam kebijakan paket C, sangat terbatas jumlahnya serta petugas juga relatif kurang, sedangkan masyarakat yang mengikuti pendidikan paket C relatif tidak seimbang dalam hal ini relatif banyak. Dari hasil penelitian pada dimensi Sikap pelaksana bahwa pada umumnya masyarakat belum banyak mengetahui tentang program paket C, pada umumnya mengatakan bahwa tidak perlu mengetahui sebab bukan urusan mereka, yang penting pemerintah menyediakan fasilitas untuk masyarakat putus sekolah, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan pendidikannya.

### **3. Kualitas Sumber Daya Manusia**

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dipilih dan ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan yang jelas dalam rangka merespon masalah-masalah publik yang berkembang. Salah satu tujuan implementasi tentang kebijakan program paket C, adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, disatu sisi pelaksanaan kebijakan juga dituntut untuk selalu bekerja dengan baik agar peserta program paket C pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Harapan Bangsa 1 Kota Bandar Lampung, dapat menerima ilmu yang dapat bermanfaat dalam peningkatan sumber daya manusia.

Dengan demikian, kesepakatan para pejabat instansi terhadap tujuan undang-undang dan sebagai konsekuensinya peluang keberhasilan implementasinya dalam pelaksanaan program Paket C, akan semakin besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan kesetaraan.

Kebijakan program paket C, yang dilaksanakan pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Harapan Bangsa 1 Kota Bandar Lampung telah berjalan sesuai ketentuan, namun keterbatasan kemampuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat untuk membiayai dari peserta didik sehingga perlu bantuan pemerintah secara serius untuk meningkatkan kemampuan peserta didik. sebab dalam penyelenggaraan tidak mungkin melaksanakan proses belajar mengajar jika tidak ditunjang oleh pemerintah, khususnya pendanaan.

Namun, Kesepakatan pada tujuan undang-undang tidak akan membawa banyak manfaat terhadap upaya pencapaian kalau para pejabat pelaksana tidak menunjukkan

kemampuan dalam memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia guna mencapainya. Kemampuan ini, yang biasanya dalam literatur dibahas di bawah rubrik kepemimpinan, terdiri dari unsur-unsur yang bersifat politis dan yang bersifat managerial.

#### **4. Struktur Birokrasi.**

Struktur birokrasi yaitu unsur-unsur didalam lingkungan organisasi yang mempengaruhi implementasi kebijakan (seperti aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik). Melalui jawaban responden, dapat diketahui bahwa faktor lingkungan, dalam implementasi kebijakan program paket C tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sekitarnya. Demikian pula halnya dengan kebijakan publik. Kebijakan publik pasti akan dibentuk dan membentuk lingkungan sekitarnya (sosial, politik, ekonomi, maupun budaya). Dimana pada satu saat kebijakan publik menyalurkan masukan pada lingkungan sekitarnya, dan pada saat yang sama atau yang lain, lingkungan sekitar dapat membatasi dan memaksakannya pada perilaku yang harus dikerjakan oleh para pengambil keputusan/pembuat kebijakan. Artinya, interaksi antara lingkungan kebijakan dan kegiatan kebijakan publik itu sendiri memiliki hubungan yang saling pengaruh.

Implementasi kebijakan paket C yang dilaksanakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Harapan Bangsa 1 Kota Bandar Lampung telah disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat, baik jadwal pelaksanaan proses belajarnya maupun tempat belajarnya disesuaikan dengan lingkungan dimana Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat diadakan sehingga diharapkan masyarakat yang putus sekolah SMA dapat mengikuti pendidikan kesetaraan tersebut melalui program Paket C.

Pengertian Struktur birokrasi yang lebih spesifik perlu dipahami dalam hal ini yaitu pelaksanaan kebijakan program paket C yang harus disesuaikan dengan lingkungan organisasi dimana program tersebut dilaksanakan. Ia harus dipahami dalam tiga kategori besar, pertama, struktur umum di luar pemerintahan dalam arti pola-pola yang melibatkan faktor sosial, ekonomi, politik dan nilai-nilai tertentu. Kedua, struktur di dalam pemerintahan dalam arti institusional, seperti: karakteristik birokrasi, sumberdaya yang dimiliki, sumberdaya finansial yang tersedia, dan macam sebagainya. Ketiga, struktur khusus yang mempengaruhi kebijakan. Tidak hanya itu, beberapa bentuk lingkungan lain yang dapat mempengaruhi kegiatan kebijakan publik, baik dilihat dari sisi formulasi, implementasi, hingga evaluasi atau bahkan perubahan kebijakan publik, antara lain adalah: karakteristik geografis, seperti

sumber-sumber alam, iklim, sampai dengan topografi; variabel demografi, seperti populasi masyarakat, persebaran usia, hingga lokasi; budaya politik; sistem sosial; serta sistem ekonomi. Dengan demikian bahwa bagian penting dalam struktur lingkungan kebijakan, khususnya berkaitan dengan kebijakan pendidikan.

Implementasi tentang kebijakan program paket C, sangat membantu masyarakat putus sekolah, karena struktur organisasinya yang sangat sederhana, yaitu masyarakat hanya datang pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Harapan Bangsa 1 Kota Bandar Lampung, dana langsung dapat mengikuti proses pembelajaran. Struktur organisasi pendidikan melibatkan para pembuat kebijakan seperti Presiden, Gubernur, Walikota/Bupati dan individu lain yang mempengaruhi pembuatan kebijakan. Dalam lingkungan implementasi pihak yang terlibat juga jauh lebih bervariasi, tergantung dari jenis kebijakan yang ditetapkannya. Mereka adalah terdiri dari pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, kelompok masyarakat yang terkait dengan kebijakan, media massa, penilai dan lain-lain. Sedangkan yang terkait dalam lingkungan evaluasi adalah para pembuat kebijakan dan para pelaksana kebijakan. Dalam hubungan ini, akan dititik beratkan pada pembahasan faktor struktur birokrasi yang banyak diperhatikan oleh para peneliti kebijakan publik, untuk memahami pengaruhnya terhadap kebijakan yang tercipta.

## **5. Aspek Penghambat Kebijakan Pembelajaran Paket C**

### **a. Faktor Waktu**

Penduduk yang terkendala waktu untuk sekolah, seperti pengrajin, buruh, dan pekerja lainnya. Mereka adalah penduduk, yang di antara karakteristik mereka adalah : Mengabdikan waktu mereka untuk bekerja, waktu kosong hanya pada hari Sabtu dan Minggu atau hari-hari libur lainnya, Cenderung kurang memperhatikan pentingnya belajar karena sudah memiliki penghasilan, Motivasi belajar rendah, karena prioritas hidup mereka adalah bekerja untuk mencari nafkah, Mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal melalui penghasilan yang diperoleh dari pekerjaannya, Beban tanggungjawab membantu ekonomi keluarga, Kemampuan konsentrasi belajar rendah, karena fisiknya kelelahan/capek bekerja, Memiliki pengalaman yang spesifik dalam pekerjaan atau bakat tertentu, Tempat tinggal mereka terkonsentrasi di tempat/wilayah tertentu seperti lokasi industri/pabrik, perkebunan, pantai, dan lain-lain.

### **b. Faktor Ekonomi**

Kendala ekonomi seperti penduduk miskin dari kalangan nelayan, petani, penduduk kumuh dan miskin perkotaan, pekerja rumah tangga, dan tenaga kerja wanita, dapat menyebabkan kurangnya perhatian terhadap pendidikan. Penduduk nelayan/pesisir,

dengan ciri-cir adalah : Sangat dipengaruhi oleh kehidupan yang mengandalkan laut yang menantang, Perolehan hasil tangkapan/ikan yang tidak menentu, Tergantung dengan musim ikan yang hanya terjadi 8 bulan, mengalami kemiskinan yang terstruktur akibat terbelit hutang dengan juragan, Kurang memperhatikan kesehatan dan pendidikan, Jiwa/watak yang keras, dan berjiwa pengikut, Kurang memiliki kesempatan mendapat informasi, dan bimbingan atau penyuluhan.

## **6. Aspek Pendukung Kebijakan Pembelajaran Paket C**

### **a. Dukungan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Swasta**

Sesuai amanat Undang-Undang SISDIKNAS nomor 20 tahun 2003, bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pihak swasta, sehingga pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, Selain adanya alokasi anggaran dari pemerintah tetapi diharapkan partisipasi dan dukungan dari semua elemen, seperti sponsor, CSR, Hibah dan sebagainya guna penyediaan dan peningkatan kualitas pendidikan.

### **b. Motivasi, aktualisasi diri dan pengabdian dari para pengelola**

Sikap dan perilaku dari para pengelola program paket C dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut sangatlah penting dalam upaya peningkatan mutu dan kualitas pendidikan serta kebijakan pembelajaran selamam masa pandemi khususnya program paket C di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Harapan Bangsa 1 Bandar Lampung.

### **c. Keseriusan dan ketaatan dari para penyelenggara serta warga belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Harapan Bangsa 1 Bandar Lampung dalam melaksanakan kebijakan pembelajaran program paket C selama masa pandemi sangat penting dan mutlak agar sasaran implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan.**

## **E. KESIMPULAN.**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Komunikasi merupakan salah satu elemen penting dalam pelaksanaan implementasi dari suatu kebijakan, jika komunikasi dan sosialisasi tidak terjalin dengan baik serta kurangnya penyampaian informasi dari penyelenggara ke warga belajar atau sebaliknya terkait pelaksanaan kebijakan pembelajarann tersebut sehingga kegiatan pembelajaran tidak berjalan dengan optimal.
2. Disposisi atau Sikap/Perilaku dari penyelenggara serta warga belajar dalam melaksanakan dan mentaati aturan dari pemerintah secara sungguh-sungguh dan

konsisten terkait kebijakan pembelajaran yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan keterbatasan fasilitas sarana prasarana di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Harapan Bangsa 1 Kota Bandar Lampung, sehingga kegiatan belajar mengajar program Paket C selama masa pandemi belum berjalan dengan maksimal.

3. Kualitas Sumber Daya Manusia yang didalamnya terkandung profesionalitas dan kompetensi dari para penyelenggara, dalam hal ini para Tutor/Guru merupakan modal utama bagi suatu lembaga pendidikan. Jika penyelenggara dan peserta didik belum memiliki rasa tanggungjawab dan ketaatan dalam menjalankannya, sehingga kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan tidak maksimal.
4. Struktur Birokrasi adalah elemen penting dari implementasi kebijakan yang dilaksanakan dalam organisasi yang menjalankan kebijakan pembelajaran, khususnya paket C dimasa pandemi, bentuk dan karakteristik organisasi sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan, juika salah satu elemen tersebut belum terpenuhi karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Harapan Bangsa 1 Kota Bandar Lampung belum berjalan dengan optimal.

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat disusun implikasi penelitian sebagai berikut :

1. Proses pembelajaran Program paket C menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum sesuai yang diharapkan. Hal tersebut terjadi karena Implementasi Kebijakan Pembelajaran Program Paket C Selama Masa Pandemi Covid-19 di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Harapan Bangsa 1 Kota Bandar Lampung yang dilakukan belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang direncanakan karena terbatasnya sumber daya manusia, utamanya tutor atau guru yang berkualifikasi sarjana yang mau mengajar sepenuhnya, serta kurangnya fasilitas pendukung Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).
2. Dalam proses evaluasi, implementasi kebijakan Perogram Paket C, yang dilaksanakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Harapan Bangsa 1 Kota Bandar Lampung, pihak Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung perlu transparan dan terbuka terkait hal-hal yang menjadi kelemahan dari pelaksanaan pembelajaran tersebut, sehingga pelaksana Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dapat memperbaiki hal-hal yang menjadi kelemahan, utamanya pada Masa Pandemi Covid-19.
3. Hendaknya penyelenggara program paket C selalu menjalin komunikasi serta sosialisasi dengan baik dan kontinyu ke warga belajar atau sebaliknya terkait pelaksanaan kebijakan pembelajarann tersebut agar kegiatan pembelajaran berjalan secara optimal.

4. Penyediaan fasilitas sarana prasarana dan –peerubahan sikap dari penyelenggara dan menjalankannya secara konsisten terkait kebijakan pembelajaran yang didukung oleh lingkungan, agar kegiatan Belajar mengajar program Paket C dapat berjalan dengan maksimal.
5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia menuju profesionalitas dan kompetensi dari para penyelenggara, dalam hal ini para Tutor/Guru adalah sesuatu keharusan dan merupakan modal utama bagi suatu lembaga pendidikan. Jika penyelenggara dan peserta didik memiliki rasa tanggungjawab dan ketaatan dalam menjalankannya, agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.
6. Struktur Birokrasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Harapan Bangsa 1 Kota Bandar Lampung yang berbasis swadaya masyarakat hendaknya selalu berusaha mengakomodir aspirasi dari masyarakat terkait kebijakan pembelajaran, khususnya paket C di lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Harapan Bangsa 1 Kota Bandar Lampung, agar dapat berjalan dengan secara optimal.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anderson, J.E., 2007. *Public Policy Making*, New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Barusman, 2020, *Dampak Dan Penanganan Covid-19 Dalam Perspektif Multidisiplin*, OSF Preprints g7yb6, Center for Open Science.Handle: *RePEc:osf:osfxxx:g7yb6*,DOI: 10.31219/osf.io/g7yb6
- Dunn, William N., 2014. *Analisis Kebijaksanaan Publik*. Alih Bahasa: Muhadjir Darwin. Yogyakarta: Hamindita Offset.
- Edwards III, George, C., 2008. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Inc. Washington D.C.
- Fattah, Nanang. 2006. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Cetakan keempat.
- Grindle, Merilee, 2008. *Politics And Policy Implementation In The Third World*, New Jersey, Princeton University Press.
- Islamy, Irfan, 2013. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nakamura, RT, and Ted Gaebes, 2012, *The Politics of Policy Implementation*, New York ST. Mavir's Press.
- Napitupulu, Paimin. 2007. *Pelayanan Publik dan Customer Satisfication*.Bandung: Alumni.
- Nasution S, 2018. “*Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*”, Bandung Tarsito.
- Sabatier, Paul A. And Hank Jenkins-Smith (eds) 2003, *Policy Change and Earning an Advocacy Coalition Approach Bonlder CO*. West ViewPress.
- Siagian, Sondang P., 2014. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Haji Masagung.
- Smith, B.C., 2017. *Policy Making in British Government*, London : Martin Robertson. *The South Asian Ministrery Of Education Organisation (SEAMEO) 1971*.
- Wibawa, et.al., 2014. *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta, RajaGrafindo Persada,
- Anita, 2013, *Analisis Implementasi Kebijakan Program Paket B Dalam Penanggulangan Angka Putus Sekolah SMP Di Kabupaten Konawe Utara*

Muchtar, 2010, *Pengembangan model Pendidikan Kewiraswastaan Dalam Muatan Lokal Pada Kelompok Belajar Paket B Setara SLTP.*

Rochaeni, 2016. *yaitu tentang implementasi kebijakan Program Kejar Paket B*